

Nalar Hadiah dalam Rekening Mencurigakan

Oleh Triyono Lukmantoro

Juli 2010 tampaknya menjadi bulan yang membuat demikian gundah institusi Kepolisian Republik Indonesia (Polri). Momentum ulang tahun yang seharusnya bisa dijalankan secara meriah justru digantikan isu rekening mencurigakan yang dimiliki sejumlah perwira tingginya. Media massa lazim menyebut persoalan sensitif tersebut sebagai “rekening gendut” atau “celengan babi”. Sebenarnya, problematika itu dapat diselesaikan secara elegan jika pihak Polri berani menjalankan prinsip transparansi dengan melibatkan sejumlah pihak eksternal, seperti Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dan auditor publik yang benar-benar independen.

Namun, metode itu tidak ditempuh Polri, sehingga isu rekening mencurigakan tetap menjadi bola liar yang sulit dikendalikan. Penjelasan yang pernah diberikan oleh Kepala Divisi Humas Mabes Polri Irjen Edward Aritonang justru sama sekali tidak memuaskan publik. Merujuk pada undang-undang, ungkap Edward, pihaknya tidak diperbolehkan menyampaikan secara detail nama pemilik rekening. Keterangan yang diberikan kepada publik itu menunjukkan bahwa dari 23 rekening yang diselidiki, 17 di antaranya dinyatakan wajar.

Transaksi yang dikategorikan wajar menurut versi pihak polisi, sebagaimana banyak dikutip media massa, ialah: (1) bisnis keluarga, misalnya membuka usaha jasa angkot, perkebunan, dan kontraktor; (2) pembayaran utang pribadi, premi, dan polis asuransi; (3) pembayaran kepada pihak lain dengan uang dinas untuk kepentingan dinas; dan (4) pengalihan aset rupiah dalam bentuk valuta asing (dollar). Keterangan semacam itu pun masih mencuatkan rasa ingin tahu publik yang terus diliputi aneka ragam kecurigaan.

Rencana untuk membuka persoalan rekening mencurigakan kalangan jenderal polisi dengan Komisi III DPR pada 26 Juli 2010 pun urung dijalankan. Sebab, Kapolri Jenderal (Pol.) Bambang Hendarso Danuri tidak memenuhi undangan itu dengan dalih menghadiri berbagai acara di Kupang, Nusa Tenggara Timur (NTT). Agaknya, pihak Polri memang enggan untuk menjelaskan persoalan ini lagi. Hal itu dapat disimak dari pernyataan Kepala Badan Reserse Kriminal (Kabareskrim) Mabes Polri Komjen Ito Sumardi yang menegaskan bahwa persoalan “rekening gendut” itu telah dijelaskan Kadiv Humas Edward Aritonang. “Semua sudah final,” tegas Kabareskrim.

Bahkan, akibat isu “rekening gendut” itu dikabarkan Satgas Antimafia Hukum mengalami perpecahan. Inspektur Jenderal Herman Effendy, yang berasal dari unsur kepolisian, menyatakan akan mengundurkan diri dari lembaga itu karena merasa tersinggung dengan pernyataan Sekretaris Satgas, Denny Indrayana. Kepada kalangan wartawan, Denny mengabarkan bahwa Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) memberikan teguran kepada Kapolri. Presiden SBY tidak puas dengan publikasi yang dikemukakan Polri karena masih dianggap belum jelas dan mengundang pertanyaan. Sehingga, Presiden SBY meminta Polri menjelaskan lagi persoalan rekening itu.

Hubungan pribadi

Sebenarnya, terdapat penjelasan lain yang pantas dicermati untuk mengungkap persoalan “rekening gendut” itu. Penjelasan itu disampaikan oleh Ito Sumardi sendiri, pada tanggal 6 Juli 2010, yang menyatakan bahwa ada kemungkinan sumber dana rekening itu merupakan pemberian seorang pengusaha, namun tidak terkait kasus tertentu. Pemberian tersebut hanya bersifat hubungan pribadi dan tidak menyangkut kedinasan. Pemberian itu tidak melanggar hukum karena dilakukan sebelum ada pasal-pasal yang mengatur masalah gratifikasi.

Pemberian bersinonim dengan hadiah (*gift*). Hadiah memang tidak berkaitan dengan memberi uang, barang berharga, fasilitas, atau potongan harga yang mengarah pada penyuapan. Hadiah yang bermotif untuk menyuap seseorang yang berstatus terhormat lazim disebut sebagai gratifikasi. Persoalannya ialah mungkinkah seorang pengusaha memberi uang kepada perwira polisi tanpa maksud tertentu? Adalah benar pemberian hadiah itu sekadar didasarkan pada relasi-relasi personal. Namun, apakah hadiah yang nilainya sangat fantastik itu benar-benar netral?

Untuk mengungkapkan persoalan ini, pemikiran yang dikemukakan Marcel Mauss (1872-1950) dalam *The Gift* pantas direnungkan. Bagi Mauss, sebagaimana diuraikan oleh Ilana Krausman Ben-Amos (*The Culture of Giving*, 2008), pemberian hadiah diikuti dengan pertukaran ketimbang penawaran sepihak. Proses pertukaran ini sangat berlainan dengan pertukaran yang terjadi di pasar yang dimediasikan oleh uang dan harga. Bukan seperti transaksi-transaksi pasar yang bercorak seketika dan anonim (tanpa nama), maka hadiah sebagai modus pertukaran berimplikasi pada interaksi-interaksi berjangka waktu lama dan menyajikan ikatan-ikatan kewajiban.

Mengapa? Ada tiga alasan yang menjelaskannya. *Pertama*, pemberian hadiah menciptakan jalinan timbal-balik. Hadiah harus dibalas dengan hadiah lain. *Kedua*,

pemberian hadiah dan ketimbal-balikan tersebut dipisahkan oleh berlalunya waktu, sehingga pertukaran hadiah berlangsung dalam rentang waktu yang panjang. *Ketiga*, hadiah-hadiah yang dipertukarkan dalam relasi-relasi sosial menunjukkan perilaku bujukan, ganjaran, dan berbagai motif yang terulang-ulang. Pemberian hadiah diikat oleh kekuasaan dan status sosial yang bisa melampaui keberadaan hadiah itu sendiri. Hadiah menunjukkan bagaimana kedudukan dan martabat seseorang dipertahankan.

Hadiah merupakan situs pertarungan harga diri. Seorang pengusaha besar tidak mungkin memberikan hadiah bernilai rendah kepada aparat keamanan berpangkat perwira. Ini terjadi karena dalam hadiah itu hendak dibuktikan seberapa terhormat status yang dimiliki si pengusaha. Semakin mahal harga hadiah, entah dalam bentuk uang tunai yang ditransfer ke rekening sang perwira maupun dalam bentuk barang dan fasilitas yang amat berharga, maka semakin menjulang pula harga diri si pengusaha. Karena status sang perwira adalah aparat keamanan, maka untuk membalas hadiah itu diwujudkan dalam bentuk hadiah lain yang tidak kalah mahal, misalnya perlindungan hukum atau jaminan keamanan dalam rentang waktu yang panjang.

Berlainan halnya ketika si pengusaha memberikan uang kepada pengemis, anak-anak yatim, dan kaum yang memiliki status sosial yang lebih rendah. Pemberian uang itu tidak dapat dikategorikan sebagai hadiah, melainkan bukti sikap murah hati atau kedermawanan saja. Hal ini bisa terjadi karena memberikan hadiah selalu disertai dengan kalkulasi status sosial yang disandang seseorang. Seorang pengemis di jalanan memiliki status sosial yang demikian marginal, sehingga si pengusaha tidak mungkin mengharapkan balasan. Ucapan terima kasih dan doa dirasakan sudah cukup. Sikap kedermawanan memang bersifat sepihak (unilateral).

Relasi-relasi sosial

Sedangkan nilai hadiah bagi seorang aparat keamanan berpangkat perwira justru mendatangkan kewajiban untuk membalas (resiprokal). Jika jalinan resiprokal itu terhenti, maka sang perwira dianggap tidak tahu diri dan gagal menjaga statusnya yang sangat terhormat. Atau, bisa-bisa sang perwira dituduh melakukan pemerasan. Di situlah pemberian hadiah menciptakan siklus (perputaran) relasi-relasi sosial yang semakin mengakrabkan aktor-aktornya. Memang, untuk membalas hadiah tidak perlu dijalankan secara seketika, melainkan disesuaikan dengan perhitungan momentum yang dirasakan tepat. Semakin tepat waktu memberikan hadiah, maka semakin tepat pula balasan wajib disajikan. Jadi, nilai hadiah harus berbanding lurus dengan status.

Merupakan hal yang begitu naif, atau pura-pura tidak tahu, apabila dikatakan pemberian hadiah kepada perwira polisi cuma bersifat personal dan tidak punya kaitan dengan kasus. Ketika seorang pengusaha memberikan hadiah pada saat terjadi kasus hukum, maka pantas disebut sebagai gratifikasi. Tapi, ketika belum ada kasus hukum yang menjerat si pengusaha, maka pemberian hadiah bisa menjadi sejenis “tabungan kebaikan” yang harus dibalas dengan “kebaikan” pula oleh sang perwira polisi pada momentum yang dirasakan tepat. Benar apa yang dikemukakan Peter Grabosky dan Julie Ayling (*Ambiguous Exchanges and the Police*, 2007) yang menyatakan hadiah bagi polisi bisa mempunyai sifat memaksa (koersif) yang sangat lembut. Ketika polisi merasa berhutang budi kepada si pemberi hadiah, maka risiko munculnya perasaan favoritisme atau secara potensial dipersepsikan sebagai favoritisme, sulit dihindari.

Apalagi jika hadiah berupa uang itu diberikan beberapa kali yang menjadikan rekening sejumlah perwira begitu gendut bagaikan babi. Hadiah tidak saja menyajikan keakraban jalinan perkawanan, melainkan sebagai sejenis penyuapan prabayar ketika kasus hukum belum menjerat si pengusaha. Inilah gratifikasi yang “dibayar di muka”, yang berperan sebagai uang panjar penyelesaian perkara yang suatu ketika akan tiba. Jadi, ada kemungkinan nalar hadiah itu yang menjadikan “celengan babi” sejumlah perwira polisi menjadi tambun sekali. Tapi, hal ini harus dibuktikan secara hati-hati.

* * *

Triyono Lukmantoro, dosen Sosiologi Komunikasi FISIP Undip Semarang.
(*Seputar Indonesia*, 3 Agustus 2010)